



Menggugat Hak Hidup PENGIDAP HIV/AIDS

Bagi yang sudah terjangkit, bukan berarti kiamat dan tak bisa beraktivitas.

Rosyid Nurul Hakim, Prima Restri

Di sudut gang di Kota Yogyakarta, sepasang suami istri dan seorang anak lelakinya tinggal di sebuah rumah kontrakan. Di rumah mungil itu, mereka membuka usaha *laundry* pakaian kiloan serta menjual makanan dan minuman ringan.

Sekilas tak ada yang aneh dari penampilan keluarga muda itu. Mereka terlihat sehat walafiat dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka juga hidup normal dan bergaul akrab dengan para tetangganya.

Tak dinyana, ternyata sang suami adalah pengidap HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*). "Istri saya sudah tahu bahwa saya HIV/AIDS sebelum kami menikah. Namun, ia tetap memutuskan menikah dengan saya," kata lelaki berusia 30 tahun itu.

AIDS merupakan penyakit yang paling ditakuti pada saat ini. HIV, virus yang menyebabkan penyakit ini, merusak sistem pertahanan tubuh (sistem imun). Seseorang yang positif mengidap HIV memang belum tentu mengidap AIDS. Namun, HIV yang ada pada tubuh seseorang akan terus merusak sistem imun. Akibatnya, virus, jamur, dan bakteri yang biasanya tidak berbahaya menjadi sangat berbahaya karena rusaknya sistem imun tubuh.

Keluarga muda yang tinggal di sudut gang Kota Yogyakarta itu merasa beruntung karena ada pihak yang membantunya menjalankan kehidupan. Ia mendapatkan bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial bagi anak dengan HIV/AIDS dan orang dengan HIV/AIDS (ADHA/ODHA).

Hal serupa dikemukakan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Keluarga Besar Waria Yogyakarta (LSM Kebaya), Vinolia. Ia mengakui bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk memerangi HIV/AIDS, penyakit yang identik dengan kehidupan waria (wanita pria).

Diakuinya; selain waria; kalangan gay, biseks, dan transgender juga rawan terhadap HIV/AIDS. Langkah yang dilakukan lembaga itu, selain memberikan pendampingan bagi waria yang terjangkit, juga aktif memberikan pembekalan kepada masyarakat mengenai bahaya virus mematikan itu.

Diskriminasi

Pendampingan terhadap ADHA/ODHA juga dilakukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beranggotakan para penderita HIV/AIDS. Mereka menjadi penggiat dan penyuluh tentang bahaya HIV/AIDS. Bahkan, beberapa di antaranya secara terbuka membuka statusnya kepada masyarakat. "Saya terang-terangan membuka status sebagai penderita walaupun risikonya akan ada perlakuan diskriminasi," papar pimpinan LSM tersebut.

Mereka pun yakin dapat berumur panjang karena sudah ada obat ARV (antiretro viral) yang harganya murah dan terjangkau. ARV merupakan stimulus untuk mempertahankan kekebalan tubuh yang dirongrong virus HIV. Bila dikonsumsi teratur,



ILUSTRASI: DAAN YAHYA/REPUBLIKA

ARV dapat membantu menurunkan tingkat kematian penderita AIDS.

Selama ini, penderita AIDS memperoleh ARV dengan harga murah karena disubsidi pemerintah dan bantuan asing dengan membeli lisensi ARV. "Lebih dari 18.000 penderita HIV/AIDS kualitas hidupnya meningkat karena mengonsumsi ARV," imbuh pimpinan LSM yang bergerak di bidang penyuluhan AIDS tersebut.

Bantuan dari pemerintah bukan hanya berupa obat, tetapi juga modal usaha seperti yang dilakukan di empat kota: Sorong, Bandung, Yogyakarta, dan Medan (lihat tabel). "Tidak boleh ada diskriminasi dan stigma negatif terhadap penderita virus ini. Bagi yang sudah terjangkit, bukan berarti kiamat atau akhir dari segalanya," kata Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos) Kementerian Sosial, Makmur Sunusi.

Ia mengakui, ancaman HIV/AIDS di Indonesia semakin nyata seiring dengan merebaknya kasus narkoba dan penyalahgunaan zat adiktif (napza) suntik. Bahkan, Indonesia tidak lagi tergolong sebagai negara dengan prevalensi rendah, tetapi sudah masuk ke epidemi terkonsentrasi dengan lima persen dari populasi tertentu yang mengidap HIV. Angkanya terus meningkat secara tajam.

Karena itu, lanjut Makmur, prioritas utama dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS adalah mengubah perilaku masyarakat yang berisiko tinggi dan rawan penularan HIV/AIDS ke arah perilaku yang bertanggung jawab.

Kata bertanggung jawab ini pula yang dituntut sejumlah anggota DPR terhadap Pangdam Cendrawasih Mayjen Hotma Marbun, terutama setelah Pangdam mengumumkan ada 144 prajurit TNI di Papua yang terjangkit

HIV/AIDS. Bahkan, anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin minta Panglima TNI segera memberhentikan prajurit TNI yang terkena HIV/AIDS karena tidak akan efektif dalam melakukan tugasnya sebagai prajurit.

"Pengobatan harus segera diberikan. Bila memang mereka terkena HIV/AIDS, sebaiknya diberhentikan saja karena tidak efektif," kata Hasanuddin.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Umum TNI, Kolonel Lek Prakoso, status HIV/AIDS tidak bisa dijadikan dasar untuk memecat seseorang dari dinas militer.

"Pemisahan dapat dilakukan atas dasar permintaan anggota tersebut atau atas dasar status kesehatannya yang ditentukan melalui sidang Badan Pemeriksa Kesehatan," ujar Prakoso.

Namun, tempat penugasan bagi pengidap HIV positif memang kemudian didekatkan dengan fasilitas kesehatan TNI. "Agar lebih mudah memantunya. Bahkan, pengidap HIV/AIDS di lingkungan TNI juga masih bisa menikah," kata Prakoso.

Ketika hendak menikah, lanjutnya, sebelum mendapat izin, anggota TNI wajib membuka status kepada calon pasangan dan diketahui oleh komandannya. Jika masih tetap akan menikah, diwajibkan mengikuti konseling pranikah. Tujuannya agar tidak terjadi penularan ke pasangan.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah TNI dalam memerangi HIV/AIDS. Semenjak mendapatkan laporan tentang 144 anggota TNI yang teridentifikasi mengidap virus tersebut, TNI telah menyusun langkah strategis penanganan untuk tahun 2010 hingga 2014.

Stigma buruk

"Penderita HIV/AIDS mempunyai potensi dan keterampilan yang sama dengan masyarakat biasa. Namun, stigma terhadap penyakit yang didapinya membuat mereka tak bisa berkreasia dengan sepenuhnya," ujar Makmur Sunusi.

Pemerintah mengakui telah mencegah terjadinya stigma buruk bagi ODHA di masyarakat. Salah satunya dengan melakukan program *voluntary counseling and test* (VCT). Dalam program VCT, masyarakat diharapkan dapat mengonsultasikan masalah kesehatannya secara sukarela.

Selain itu, untuk masyarakat dengan tingkat penularan yang lebih tinggi, pemerintah melakukan upaya lain. Yakni, program *provider initiated counselling and test* (PITC). "Untuk mereka yang *suspect* penderita HIV/AIDS, kita ajak untuk konseling," ujar Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Adhitama.

Di lingkungan kerja, para penderita virus itu kerap menjadi pihak yang lemah. Namun, pemerintah mengatakan, hal tersebut tidak terjadi. Direktur Norma K3 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Arief Supono, mengatakan, dalam lima tahun terakhir, tak ada laporan yang mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan terhadap para ODHA di lingkungan kerja.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Nafsiah Mboi, mengatakan, pihaknya selalu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait pencegahan penularan HIV/AIDS. "Anggota KPA terdiri atas berbagai instansi," ujarnya. Dia mencontohkan, untuk instansi militer, Panglima TNI adalah salah satu anggota KPAN sehingga upaya pencegahan terhadap anggota TNI selalu dilakukan.

Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Suyanto, mengatakan, pihaknya hanya berperan sebagai lembaga yang membawahi kegiatan pendidikan seksologi yang sehat kepada murid-murid. Sementara itu, Ketua Yayasan Layak, Evie Tarigan, mengatakan, jumlah murid sekolah atau anak-anak dengan status ADHA dalam beberapa tahun belakangan ini meningkat. Hingga Agustus 2010, mereka menanganai 68 orang ODHA dan 43 di antaranya adalah ADHA.

Banyaknya jumlah ADHA, jelas Ketua Yayasan Layak, Evie Tarigan, karena penularan dari ibu ke anaknya. "Ibu-ibu banyak yang tidak menyadari sudah terinfeksi HIV/AIDS. Jadi, saat mengandung dan melahirkan, si ibu tidak sadar berpotensi menularkan HIV/AIDS kepada anaknya," tutur dia.

Evie tak membantah bahwa pemerintah sudah melakukan upaya, tetapi ia menyayangkan masih kecilnya dana APBD khusus untuk menangani ADHA. Dana masih dijadikan satu dengan penanganan ODHA.

Siapa pun tentu saja tak ingin ada yang terjangkit virus ini. Namun, bukan berarti kehidupan akan berakhir. Kehidupan harus terus dilanjutkan karena penderita tetap memiliki harapan untuk bisa berkiprah di tengah masyarakat. ■ ed: selamat g'nting

Kasus kumulatif HIV/AIDS tahun 2010 berjumlah 21.770 pasien.

Provinsi Tertinggi

DKI Jakarta 3.740 pasien
Jawa Barat 3.710 pasien
Jawa Timur 3.540 pasien
Papua 2.858 pasien

* Data Kementerian Kesehatan

Program Perlindungan Sosial Anak terhadap Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) dan Pemberdayaan Keluarga di Empat Provinsi

No Kota/Provinsi	Jumlah ADHA/KK	Jenis Usaha
1. Bandung/Jawa Barat	25/25	Counter pulsa dan <i>service</i> HP, warung sembako, warung es jus, ternak bebek, warung kelontong, dagang pakaian, warung makan dan kelontong, konveksi, jual gas elpiji dan Aqua galon.
2. Yogyakarta/DIY	25/25	Counter pulsa dan <i>service</i> HP, warung sembako, studio tato, <i>laundry</i> , warung es jus, ternak bebek, ternak ikan, warung kelontong, dagang pakaian, warung makan dan kelontong, counter kosmetik, ternak sapi dan kambing.
3. Medan/Sumatra Utara	26/25	Counter pulsa dan <i>service</i> HP, warung sembako, warung es jus, ternak ikan lele, warung kelontong, dagang pakaian, warung makan dan kelontong, salon dan tata rias.
4. Sorong/Papua Barat	28/25	Counter pulsa, warung sembako, warung makan, warung kelontong, ternak babi, jual ikan, <i>laundry</i> , jual sagu dan atap rumbai, jual kerajinan manik-manik dan pinang, nelayan ikan dan kepiting, jasa pariwisata laut, warung kue dan kelontong, jual sayuran, jual ayam potong.

*Data Kementerian Sosial